

Abstrak

Ruang publik kerap dibayangkan sebagai arena yang terbuka dan setara bagi semua warga, namun bagi perempuan muda di Kota Jayapura, ruang tersebut sarat kekerasan keseharian, pelecehan seksual, dan keterbatasan mobilitas yang berlapis akibat warisan konflik, ketimpangan struktural, serta norma adat yang patriarkal. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perempuan muda di Papua memaknai fungsi dan ancaman ruang publik dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana mereka menegosiasikan rasa aman, kebebasan, dan keadilan gender di dalamnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, melibatkan wawancara mendalam terhadap sebelas partisipan perempuan berusia 20 hingga 30 tahun dari latar Orang Asli Papua dan pendatang. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap sebelas partisipan, didukung observasi, pemetaan risiko, serta diskusi kelompok terarah dengan aktivitas *Tree of Hope* sebagai sumber pelengkap yang mengonfirmasi temuan dan menampung aspirasi kolektif. Analisis dilakukan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre dan geometri kekuasaan Doreen Massey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan fisik sebuah ruang tidak otomatis menghasilkan keterbukaan sosial. Taman yang secara formal terbuka justru dihindari karena dikuasai praktik minum alkohol dan *catcalling*, sementara kafe berbayar dimaknai sebagai ruang publik yang sesungguhnya, sebuah tanda bahwa rasa aman telah menjadi sesuatu yang harus dibeli. Kerawanan di Jayapura juga tidak terjadwal, dan destinasi yang aman kerap hanya dapat dijangkau melalui rute yang tidak aman. Menghadapi kondisi tersebut, perempuan muda menjalankan lima strategi negosiasi, yaitu relasi yang melindungi, legitimasi kegiatan gereja, motor dan ojek daring, strategi digital, serta ruang komersial berbayar. Kelima strategi ini membentuk ruang perantara, konsep yang dibangun dari gagasan Lefebvre tentang ruang representasional dan apropriasi. Kapasitas memproduksi ruang perantara tidak setara, melainkan ditentukan oleh gender, kelas ekonomi, dan hierarki adat, serta mewujudkan sebagai kerja tambahan demi rasa aman yang harus ditanggung perempuan sebelum sekadar hadir di ruang publik. Seluruh temuan bermuara pada tuntutan hak atas kota, yakni kota yang memperhitungkan perempuan muda sebagai penggunaanya sejak awal.

Kata kunci: ruang publik; perempuan muda; produksi ruang; geometri kekuasaan; ruang perantara; Kota Jayapura

Abstract

Public space is often imagined as an open and egalitarian arena for all citizens. For young women in Jayapura City, however, it is saturated with everyday violence, sexual harassment, and layered constraints on mobility produced by the legacy of conflict, structural inequality, and patriarchal customary norms. This study analyzes how young women in Papua make sense of the functions and threats of public space in daily life, and how they negotiate safety, freedom, and gender justice within it. It employs a qualitative, ethnographic approach, drawing on in-depth interviews with eleven female participants aged 20 to 30 from Indigenous Papuan (Orang Asli Papua) and migrant backgrounds. The primary data come from these in-depth interviews, supported by observation, risk mapping, and a focus group discussion featuring a Tree of Hope activity as complementary sources that confirm the findings and capture collective aspirations. The analysis draws on Henri Lefebvre's theory of the production of space and Doreen Massey's power-geometry. The findings show that the physical openness of a space does not automatically produce social openness. Parks that are formally open are in fact avoided because they are dominated by alcohol consumption and catcalling, while paid cafés are understood as the real public space, a sign that safety has become something that must be purchased. Insecurity in Jayapura also follows no fixed schedule, and safe destinations can often be reached only through unsafe routes. In response, young women deploy five negotiation strategies: protective relationships, the legitimacy of church activities, motorcycles and app-based motorcycle taxis (ojek), digital strategies, and paid commercial space. Together these strategies constitute an intermediary space, a concept developed from Lefebvre's notions of representational space and appropriation. The capacity to produce intermediary space is not evenly distributed but is determined by gender, economic class, and customary (adat) hierarchy, and it manifests as the additional safety work that women must bear before they can even be present in public space. All of the findings converge on a demand for the right to the city, that is, a city that accounts for young women as its users from the outset.

Keywords: *public space; young women; production of space; power-geometry; intermediary space; Jayapura City*

Untuk mamak dan bapak di surga

Untuk semua cahaya semesta,

Terima kasih

Mari hidup dan merayakan hidup